COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN *EVENT TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL* (TIFF) DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

Stevy Benedict Faraday Supit
NPP. 33.0866
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: supitstevy@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Timoty Yusuf Salama, S.STP, M.Tr.I.P
Email: Timotyyusufsalama21@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The implementation of large-scale tourism events requires collaboration among multiple stakeholders due to the limitations of resources and capacities possessed by a single organization in managing complex activities. The Tomohon International Flower Festival (TIFF), as one of Indonesia's leading tourism events, involves government agencies, private sectors, communities, media, business actors, and local communities. However, the implementation of TIFF still faces several challenges, including the dominance of government actors in decision-making processes, coordination constraints among stakeholders, and the unequal distribution of benefits among participants. Therefore, a Collaborative Governance approach is needed to create synergy among stakeholders in the implementation of TIFF.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze Collaborative Governance in the implementation of the Tomohon International Flower Festival (TIFF) in Tomohon City, North Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study employed a qualitative method with a descriptive approach based on the Collaborative Governance theory proposed by Ansell and Gash. Data were collected through interviews and documentation. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques, involving local government officials, organizing committees, business actors, community organizations, media representatives, security personnel, and local communities.* ***Result:*** *The findings reveal that Collaborative Governance in the implementation of TIFF has been carried out through four main dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. The initial conditions were supported by economic benefits, tourist arrivals, and stakeholder involvement. Institutional design was reflected in a formal organizational structure and clear role distribution. Facilitative leadership was demonstrated through coordination and resource mobilization by the local government. Meanwhile, the collaborative process was characterized by communication, trust-building, shared commitment, and a common understanding among stakeholders in organizing TIFF.* ***Conclusion:*** *Collaborative Governance in the implementation of the Tomohon International Flower Festival (TIFF) in Tomohon City has been implemented fairly well through the involvement of multiple stakeholders, institutional support, facilitative leadership, and a sustainable collaborative process.*

Keywords: *Collaborative Governance; Tomohon International Flower Festival; Tourism*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penyelenggaraan event pariwisata berskala internasional memerlukan kolaborasi berbagai stakeholder karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh satu organisasi dalam mengelola kegiatan yang kompleks. Tomohon International Flower Festival (TIFF) sebagai salah satu event unggulan pariwisata nasional melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas, media, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun demikian, penyelenggaraan TIFF masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, keterbatasan koordinasi antar stakeholder, serta belum meratanya manfaat yang dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *Collaborative Governance* untuk mewujudkan sinergi antar stakeholder dalam penyelenggaraan TIFF. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Event Tomohon International Flower Festival (TIFF) di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap *Collaborative Governance* menurut teori Ansell dan Gash. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang melibatkan pemerintah daerah, panitia pelaksana, pelaku usaha, komunitas, media, aparat keamanan, dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan TIFF telah berjalan melalui empat dimensi utama, yaitu *starting conditions, institutional design, facilitative leadership,* dan *collaborative process*. Kondisi awal kolaborasi didukung oleh adanya manfaat ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan, serta keterlibatan berbagai stakeholder. Desain kelembagaan diwujudkan melalui struktur kepanitiaan yang memiliki dasar hukum yang jelas serta pembagian tugas yang terorganisasi. Kepemimpinan fasilitatif dijalankan oleh pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan mobilisasi sumber daya. Sementara itu, proses kolaborasi berlangsung melalui komunikasi, koordinasi, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman yang sama mengenai tujuan penyelenggaraan TIFF. **Kesimpulan:** ***C****ollaborative governance* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) di Kota Tomohon telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai stakeholder, dukungan kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance; Tomohon International Flower Festival;* Pariwisata

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas dan daya saing wilayah. Perkembangan sektor pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan berbagai sektor pendukung seperti perdagangan, transportasi, perhotelan, dan industri kreatif. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Khaksar & Amir, 2023; Nurjaya, 2022).

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan kegiatan pariwisata tidak lagi dapat dilaksanakan secara parsial oleh pemerintah semata. Kompleksitas pengelolaan destinasi dan event pariwisata

menuntut adanya keterlibatan berbagai aktor yang terdiri atas pemerintah, sektor swasta, komunitas, media, akademisi, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan sumber daya, memperluas jaringan promosi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan keberlanjutan kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi penting karena mampu mendorong terwujudnya proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara kolaboratif antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008; Wang & Ran, 2022).

Salah satu daerah yang berhasil mengembangkan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event berskala internasional adalah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Kota Tomohon secara konsisten menyelenggarakan **Tomohon International Flower Festival (TIFF)** sebagai agenda pariwisata unggulan yang telah masuk ke dalam *Karisma Event Nusantara* Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. TIFF tidak hanya menjadi sarana promosi pariwisata daerah, tetapi juga berperan dalam memperkuat citra Kota Tomohon sebagai *Flower City*, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha dan masyarakat (Aryona & Leksono, 2024).

Tomohon International Flower Festival (TIFF) telah berkembang menjadi salah satu agenda pariwisata unggulan yang memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata Kota Tomohon. Keberhasilan penyelenggaraan TIFF tidak hanya terlihat dari keberlanjutan pelaksanaannya setiap tahun, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Tomohon. Sebagai event berskala internasional yang menjadi ikon pariwisata daerah, TIFF mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Tomohon. Besarnya kontribusi TIFF terhadap total kunjungan wisatawan Kota Tomohon selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Data Persentase Kontribusi TIFF terhadap Total Wisatawan Kota Tomohon Tahun 2023-2025

Tahun	Pengunjung TIFF	Total Wisatawan Kota Tomohon	Kontribusi TIFF
2023	323.591	517.059	62.58%
2024	354.965	555.204	63.93%
2025	378.251	566.438	66.78%

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tomohon, 2026

Berdasarkan Tabel 1, kontribusi TIFF terhadap total kunjungan wisatawan Kota Tomohon menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah pengunjung TIFF tercatat sebanyak 323.591 orang atau berkontribusi sebesar 62,58% terhadap total kunjungan wisatawan Kota Tomohon. Pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 354.965 orang dengan kontribusi sebesar 63,93%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat kembali menjadi 378.251 orang atau berkontribusi sebesar 66,78%. Peningkatan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa TIFF telah menjadi salah satu daya tarik utama pariwisata Kota Tomohon dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah (Aryona & Leksono, 2024; Khaksar & Amir, 2023).

Peningkatan kontribusi TIFF terhadap kunjungan wisatawan Kota Tomohon menunjukkan bahwa penyelenggaraan event ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan pariwisata daerah. Namun demikian, penyelenggaraan sebuah event berskala internasional tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah semata. Kompleksitas kegiatan yang meliputi perencanaan, promosi, pengelolaan sumber daya, penyediaan infrastruktur, hingga pelayanan wisatawan

memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Oleh karena itu, penyelenggaraan event pariwisata membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, komunitas masyarakat, media, akademisi, dan berbagai pihak lainnya (Dangi & Petrick, 2021; Mena & Villamejor-Mendoza, 2024).

Dalam konteks penyelenggaraan TIFF, kolaborasi antar stakeholder menjadi faktor penting karena setiap aktor memiliki sumber daya dan kapasitas yang saling melengkapi. Pemerintah Kota Tomohon berperan sebagai koordinator dan pengambil kebijakan, sementara pelaku usaha mendukung melalui penyediaan layanan wisata, sponsor, dan promosi. Di sisi lain, masyarakat dan komunitas turut berkontribusi dalam menjaga citra daerah serta mendukung pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan TIFF sangat dipengaruhi oleh kemampuan para stakeholder dalam membangun komunikasi, koordinasi, serta kerja sama yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008; Wang & Ran, 2022).

Meskipun TIFF telah berkembang menjadi salah satu event unggulan nasional yang mampu menarik wisatawan dalam jumlah besar, proses kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholder tetap memerlukan perhatian khusus. Perbedaan kepentingan, pembagian peran, komitmen antar pihak, serta efektivitas koordinasi menjadi aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan event. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses collaborative governance berlangsung dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF), sehingga dapat diketahui sejauh mana kolaborasi antar stakeholder mampu mendukung keberhasilan penyelenggaraan event pariwisata tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penyelenggaraan event pariwisata telah menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik wisata, memperkuat citra daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan event pariwisata tidak hanya ditentukan oleh kualitas kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai stakeholder yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* semakin banyak digunakan untuk menjelaskan proses kerja sama antar aktor dalam penyelenggaraan program dan kegiatan publik, termasuk di sektor pariwisata (Ansell & Gash, 2008; Wang & Ran, 2022).

Penelitian mengenai kolaborasi dalam sektor pariwisata telah banyak dilakukan. Wawo et al. (2023) menemukan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pinisi Festival di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun kerja sama yang mendukung pelaksanaan event. Selain itu, Dangi dan Petrick (2021) menjelaskan bahwa tata kelola pariwisata yang kolaboratif mampu meningkatkan partisipasi, representasi, dan keberlanjutan pengembangan destinasi wisata. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pariwisata.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pengembangan destinasi wisata, dampak ekonomi pariwisata, *city branding*, maupun strategi promosi daerah. Penelitian yang secara khusus mengkaji penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) umumnya membahas kontribusi TIFF terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan citra Kota Tomohon sebagai *Flower City*, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Sementara itu, kajian yang menganalisis penyelenggaraan TIFF melalui perspektif *collaborative governance*, khususnya menggunakan dimensi *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process* dari Ansell dan Gash (2008), masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif menganalisis bagaimana proses kolaborasi antar stakeholder berlangsung dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam penyelenggaraan TIFF di Kota Tomohon dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kolaborasi yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan event pariwisata berskala internasional tersebut.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena secara akademis dapat memperkaya kajian *collaborative governance* dalam penyelenggaraan event pariwisata, khususnya pada event berskala internasional seperti Tomohon International Flower Festival (TIFF). Selama ini, penelitian terkait TIFF lebih banyak berfokus pada aspek *city branding*, pengembangan pariwisata, dan dampak ekonomi, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis proses kolaborasi antar stakeholder dalam penyelenggaraannya masih relatif terbatas. Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tomohon dan stakeholder terkait dalam meningkatkan efektivitas koordinasi, komunikasi, serta pembagian peran antar pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TIFF. Apabila kolaborasi antar stakeholder tidak dikelola secara optimal, maka berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan event dan keberlanjutan TIFF sebagai salah satu event pariwisata unggulan Kota Tomohon (Ansell & Gash, 2008; Dangi & Petrick, 2021).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Wawo, Thaha, dan Arifin (2023) mengenai collaborative governance dalam penyelenggaraan Pinisi Festival di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan event dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bekerja sama melalui mekanisme kolaboratif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar stakeholder dalam keberhasilan penyelenggaraan event pariwisata.

Penelitian kedua dilakukan oleh Dangi dan Petrick (2021) yang mengkaji peran tourism governance dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang kolaboratif mampu meningkatkan partisipasi, representasi, responsivitas, dan inklusivitas stakeholder sehingga mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antar aktor yang terlibat.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Swandewi, Adinda, Adipati, dan Febrianto (2024) mengenai perspektif masyarakat terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi Tomohon International Flower Festival (TIFF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa TIFF memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, promosi daerah, dan pengembangan pariwisata Kota Tomohon. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak penyelenggaraan TIFF dibandingkan proses kolaborasi yang melatarbelakangi penyelenggaraannya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Aryona dan Leksono (2024) mengenai strategi city branding kawasan wisata utama Kota Tomohon dalam menarik minat wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan citra Kota Tomohon sebagai destinasi wisata memerlukan dukungan berbagai stakeholder melalui strategi promosi yang terintegrasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antar pihak dalam meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Bichler (2019) mengenai collaborative governance dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antar stakeholder, komitmen terhadap tujuan bersama, serta adanya kepemimpinan yang mampu memfasilitasi proses kolaborasi. Temuan tersebut memperkuat pentingnya penerapan prinsip-prinsip collaborative governance dalam sektor pariwisata.

Penelitian keenam dilakukan oleh Sentanu dan kolega (2022) melalui kajian literatur mengenai tantangan dan keberhasilan collaborative tourism governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh adanya kepercayaan, komitmen, kepemimpinan fasilitatif, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Sebaliknya, perbedaan kepentingan antar aktor dan lemahnya koordinasi menjadi faktor yang sering menghambat proses kolaborasi dalam sektor pariwisata.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis Collaborative Governance dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) yang terdiri atas dimensi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas pengembangan pariwisata, city branding, dampak ekonomi dan sosial TIFF, serta kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menelaah proses kolaborasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan event pariwisata berskala internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai penerapan Collaborative Governance dalam penyelenggaraan event pariwisata serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi pada penyelenggaraan TIFF.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Event Tomohon International Flower Festival (TIFF) di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses Collaborative Governance dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF), khususnya terkait interaksi, koordinasi, dan kerja sama antar stakeholder yang terlibat. Paradigma post-positivisme digunakan karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan melalui berbagai sumber data (Creswell & Creswell, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Pariwisata Kota Tomohon, pejabat Bapelitbangda Kota Tomohon, panitia pelaksana atau event organizer TIFF, pelaku usaha florikultura, pelaku UMKM, komunitas seni dan budaya, aparat keamanan, media, serta masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan TIFF. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kota Tomohon karena memiliki peran utama dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan TIFF. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan kegiatan, surat keputusan, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan TIFF.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan

(conclusion drawing and verification). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta dokumen pendukung yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan lokus utama pada Dinas Pariwisata Kota Tomohon sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF). Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai dengan jadwal penelitian yang ditetapkan berdasarkan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *collaborative governance* dalam penyelenggaraan *Event Tomohon International Flower Festival* (TIFF) di Kota Tomohon menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008). Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan *Event Tomohon International Flower Festival* (TIFF) di Kota Tomohon. Adapun hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Kondisi Awal

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi starting conditions dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) menunjukkan kondisi awal yang cukup mendukung terbentuknya kolaborasi antar stakeholder. Menurut Ansell dan Gash (2008), starting conditions dipengaruhi oleh ketimpangan sumber daya dan kekuasaan antar aktor, sejarah hubungan kerja sama, tingkat kepercayaan, serta insentif yang mendorong para pihak untuk terlibat dalam kolaborasi. Dalam konteks penyelenggaraan TIFF, kondisi awal tersebut tercermin dari manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan, keterlibatan berbagai stakeholder, serta hubungan kerja sama yang telah terbangun melalui penyelenggaraan TIFF yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

Salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kolaborasi dalam penyelenggaraan TIFF adalah adanya manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak. TIFF tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi pariwisata daerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan penguatan citra Kota Tomohon sebagai Flower City. Besarnya manfaat yang dihasilkan dapat dilihat pada data pergerakan pengunjung TIFF Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Data Pergerakan Pengunjung TIFF Tahun 2025

Kategori	Jumlah
Total Pengunjung	378.251 orang
Wisatawan Nusantara	376.738 orang
Wisatawan Mancanegara	1.513 orang

Sumber: Laporan Kegiatan TIFF, 2025

Berdasarkan Tabel 2, jumlah pengunjung TIFF Tahun 2025 mencapai 378.251 orang yang terdiri atas 376.738 wisatawan nusantara dan 1.513 wisatawan mancanegara. Selain itu, penyelenggaraan TIFF menghasilkan estimasi perputaran ekonomi sebesar Rp95.310.354.000. Data tersebut menunjukkan bahwa TIFF mampu memberikan manfaat yang cukup besar bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat sehingga menjadi insentif yang mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Namun demikian, jumlah wisatawan mancanegara yang masih relatif kecil menunjukkan bahwa status internasional TIFF lebih terlihat pada aspek

promosi dan branding dibandingkan kontribusinya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan asing secara signifikan.

Selain manfaat yang dihasilkan, kondisi awal kolaborasi juga dapat dilihat dari keterlibatan berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan TIFF. Keterlibatan tersebut menjadi indikator penting karena menunjukkan adanya partisipasi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan kegiatan. Adapun keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan TIFF Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Keterlibatan Aktor dalam TIFF 2025

Jenis Aktor	Jumlah
UMKM	173
Asosiasi	19
Komunitas	7
Media	47

Sumber: Laporan Kegiatan TIFF, 2025

Berdasarkan Tabel 3, penyelenggaraan TIFF melibatkan berbagai stakeholder yang terdiri atas 173 pelaku UMKM, 19 asosiasi, 7 komunitas, dan 47 media. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa sejak awal telah terdapat basis partisipasi yang cukup luas dalam penyelenggaraan TIFF. Selain itu, pelaksanaan TIFF yang dilakukan secara rutin setiap tahun telah membentuk pola hubungan kerja sama yang relatif stabil serta tingkat kepercayaan yang cukup baik antar stakeholder. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah masih memiliki peran yang dominan dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan strategis, sedangkan sebagian besar aktor non-pemerintah lebih banyak berperan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan pengaruh dalam proses kolaborasi.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi starting conditions dalam penyelenggaraan TIFF telah mendukung terbentuknya kolaborasi melalui adanya manfaat yang dirasakan para stakeholder, keterlibatan berbagai aktor, serta hubungan kerja sama yang telah terbangun dengan baik. Akan tetapi, masih terdapat ketimpangan pengaruh antar aktor dan manfaat ekonomi yang cenderung bersifat musiman sehingga perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.2. Desain Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi *institutional design* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) telah dibangun melalui struktur kelembagaan yang formal dan memiliki dasar hukum yang jelas. Menurut Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan berfungsi untuk mengatur mekanisme interaksi, pembagian peran, aturan dasar, serta partisipasi para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam penyelenggaraan TIFF, desain kelembagaan diwujudkan melalui pembentukan kepanitiaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali kota Tomohon Nomor 158 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tomohon International Flower Festival Tahun 2025.

Tabel 4.
Struktur Kepanitiaan TIFF 2025 Berdasarkan SK Wali kota

Unsur/Bagian	Keterangan
Dasar Hukum	SK Wali Kota Tomohon Nomor 158 Tahun 2025
Tanggal Penetapan	25 Juli 2025
Leading Sector	Dinas Pariwisata Kota Tomohon
Keterlibatan OPD	Dinas Pendidikan, Perdagangan, Perhubungan, Kesehatan, PU, Lingkungan Hidup, dll
Keterlibatan Non-OPD	Bank Indonesia, BNI, BRI, PLN, Telkom, Asosiasi Bunga, Komunitas, Media
Struktur Teknis	Terdiri dari berbagai seksi (TOF, Carnival, Expo, Promosi, Keamanan, dll)
Pembagian Tugas	Tercantum dalam lampiran SK berdasarkan bidang/seksi

Sumber: SK Wali Kota Tomohon Nomor 158 Tahun 2025 (diolah peneliti), 2026

Berdasarkan Tabel 4, penyelenggaraan TIFF melibatkan berbagai stakeholder lintas sektor yang terdiri atas unsur pemerintah, sektor swasta, BUMN, komunitas, asosiasi, dan media. Keberadaan struktur kepanitiaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan TIFF memiliki legalitas yang kuat, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang terstruktur. Selain itu, keterlibatan berbagai aktor menunjukkan adanya upaya untuk membangun partisipasi yang inklusif dalam penyelenggaraan kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar stakeholder dilakukan melalui rapat formal lintas sektor, rapat teknis, evaluasi kegiatan, serta komunikasi informal melalui media digital. Mekanisme tersebut memungkinkan setiap bidang menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama proses penyelenggaraan kegiatan. Dari aspek transparansi, pembahasan terkait perencanaan, anggaran, dan pembagian tugas dilakukan melalui forum koordinasi yang melibatkan stakeholder utama. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh sebagian pelaku usaha, khususnya terkait pemerataan akses informasi dan pembagian fasilitas pendukung kegiatan.

Jika dianalisis berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan dalam penyelenggaraan TIFF telah memenuhi unsur clear ground rules, inclusive participation, dan clarity of roles. Hal tersebut terlihat dari adanya dasar hukum yang jelas, keterlibatan berbagai stakeholder, serta pembagian tugas yang terstruktur dalam kepanitiaan. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas koordinasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu persiapan dan sinkronisasi antar bidang yang terkadang berlangsung mendekati waktu pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penguatan manajemen waktu, transparansi operasional, dan mekanisme koordinasi perlu terus ditingkatkan agar kolaborasi yang terbangun dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi *facilitative leadership* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) menunjukkan adanya peran yang kuat dari pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Tomohon dan Dinas Pariwisata Kota Tomohon, dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi proses kolaborasi antar stakeholder. Menurut Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan fasilitatif berfungsi untuk membangun komunikasi, memfasilitasi dialog, menciptakan komitmen bersama, serta mengintegrasikan berbagai kepentingan yang terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam penyelenggaraan TIFF, Wali Kota berperan sebagai pengarah kebijakan

utama, sedangkan Dinas Pariwisata bertindak sebagai koordinator teknis yang menghubungkan berbagai aktor yang terlibat dalam kegiatan.

Peran kepemimpinan tersebut terlihat melalui pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor, pembagian tugas berdasarkan struktur kepanitiaan, serta penggunaan media komunikasi untuk mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul selama proses penyelenggaraan kegiatan. Selain memberikan arah kebijakan, pemerintah daerah juga berperan dalam memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan TIFF.

Untuk melihat kemampuan kepemimpinan dalam menggerakkan sumber daya, dapat dilihat pada keterlibatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan TIFF Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Keterlibatan SDM dalam Penyelenggaraan TIFF 2025

Jenis SDM	Jumlah
Panitia Penyelenggara	320 orang
SDM Pariwisata (Parekraf)	426 orang
Seniman	1.065 orang
Pekerja/Vendor	885 orang

Sumber: Laporan Kegiatan TIFF, 2025

Berdasarkan Tabel 5, penyelenggaraan TIFF melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup besar, terdiri atas 320 panitia penyelenggara, 426 SDM pariwisata, 1.065 seniman, dan 885 pekerja atau vendor. Data tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ada mampu menggerakkan dan mengoordinasikan berbagai kelompok yang memiliki fungsi berbeda ke dalam satu sistem kerja yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kapasitas kepemimpinan dalam mengelola kolaborasi lintas sektor yang kompleks.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membuka ruang partisipasi bagi berbagai stakeholder melalui forum koordinasi, pembagian tugas, dan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, pola kepemimpinan yang terbentuk masih cenderung bersifat top-down, di mana keputusan strategis utama masih didominasi oleh pemerintah daerah, sedangkan sebagian besar stakeholder non-pemerintah lebih banyak berperan pada tahap implementasi kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi dan koordinasi telah berjalan dengan baik, namun aspek pemberdayaan stakeholder dalam pengambilan keputusan masih perlu diperkuat.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi facilitative leadership dalam penyelenggaraan TIFF telah berjalan cukup baik melalui pemberian arah kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan mobilisasi sumber daya yang mendukung keberhasilan kegiatan. Akan tetapi, untuk meningkatkan kualitas kolaborasi, diperlukan penguatan pada aspek partisipasi dan pemberdayaan stakeholder agar proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih inklusif dan seimbang sesuai dengan prinsip facilitative leadership yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008).

3.4. Proses Kolaborasi

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi *collaborative process* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) menunjukkan adanya interaksi yang aktif dan berkelanjutan antar stakeholder dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Ansell dan Gash (2008), proses kolaborasi dibangun melalui dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), serta pencapaian hasil antara (*intermediate*

outcomes). Dalam penyelenggaraan TIFF, proses tersebut terlihat melalui keterlibatan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan kegiatan.

Tabel 6.
Keterlibatan Aktor-Aktor dalam Penyelenggaraan TIFF Tahun 2025

Aktor	**Peran dalam Kolaborasi**
Pemerintah Daerah (Wali Kota)	Penentu kebijakan dan arah strategis
Dinas Pariwisata	Koordinator utama dan pelaksana kegiatan
Bappelitbangda	Perencana strategis dan pengawas keberlanjutan
OPD lainnya	Pendukung teknis sesuai bidang (PU, Dishub, Kesehatan, dll)
Petani Florikultura	Penyedia bunga sebagai bahan utama
Pelaku UMKM	Penyedia produk dan penggerak ekonomi lokal
Komunitas Seni & Budaya	Pengisi acara dan penguat identitas lokal
Aparat Keamanan (Polri, TNI)	Pengamanan dan pengaturan lalu lintas
Media	Publikasi, promosi, dan kontrol sosial
Masyarakat	Partisipasi langsung dan penyedia jasa informal

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 6, proses kolaborasi dalam penyelenggaraan TIFF melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Pemerintah daerah berperan dalam memberikan arah kebijakan, Dinas Pariwisata bertindak sebagai koordinator utama, sedangkan stakeholder lainnya berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan TIFF tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga didukung oleh partisipasi sektor swasta, komunitas, media, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog dan koordinasi antar stakeholder dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, evaluasi kegiatan, serta komunikasi informal melalui media digital. Interaksi yang berlangsung secara berulang tersebut membentuk hubungan kerja sama yang relatif baik dan mendorong tumbuhnya kepercayaan antar aktor. Selain itu, penyelenggaraan TIFF yang dilakukan secara rutin setiap tahun turut memperkuat komitmen stakeholder untuk terus mendukung pelaksanaan kegiatan. Penelitian juga menemukan bahwa seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan penyelenggaraan TIFF, yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan, mempromosikan Kota Tomohon, dan memperkuat posisi TIFF sebagai event pariwisata unggulan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam proses kolaborasi, khususnya terkait pemerataan manfaat ekonomi, transparansi akses bagi sebagian pelaku usaha, serta dampak teknis yang dirasakan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, koordinasi teknis antar stakeholder masih perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh pihak memperoleh informasi dan kesempatan yang setara dalam proses penyelenggaraan kegiatan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi collaborative process dalam penyelenggaraan TIFF telah berjalan cukup baik yang ditunjukkan melalui komunikasi yang intensif, keterlibatan berbagai stakeholder, komitmen bersama, serta pemahaman yang sama terhadap tujuan kegiatan. Akan tetapi, penguatan koordinasi teknis, transparansi, dan pemerataan manfaat masih diperlukan agar kolaborasi yang terbangun dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan

berkelanjutan sesuai dengan konsep collaborative process yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008).

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) di Kota Tomohon menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan event pariwisata berskala internasional tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah daerah, tetapi merupakan hasil kolaborasi berbagai stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Penulis menemukan temuan penting bahwa kolaborasi yang dibangun melalui struktur kelembagaan yang jelas, kepemimpinan pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan berbagai aktor mampu mendukung keberhasilan penyelenggaraan TIFF sebagai salah satu event unggulan pariwisata nasional. Keterlibatan pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha florikultura, UMKM, komunitas seni dan budaya, media, aparat keamanan, serta masyarakat menjadi faktor yang mendukung keberlangsungan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sama halnya dengan temuan Wawo, Thaha, dan Arifin (2023), penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antar stakeholder menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan event pariwisata. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Dangi dan Petrick (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang dibangun melalui komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan berbagai pihak. Dalam penelitian ini, koordinasi dilakukan melalui rapat lintas sektor, pembentukan kepanitiaan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota, komunikasi melalui media digital, serta berbagai forum koordinasi yang melibatkan stakeholder terkait.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menjelaskan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum kolaborasi, tetapi juga oleh kemampuan para aktor dalam membangun dinamika kolaborasi melalui komunikasi, komitmen bersama, dan kepercayaan antar pihak. Dalam penyelenggaraan TIFF, dinamika tersebut terlihat melalui pelaksanaan rapat koordinasi, komunikasi lintas sektor, serta keterlibatan berbagai stakeholder dalam mendukung keberhasilan kegiatan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Agranoff dan McGuire (2003) yang menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan publik yang kompleks memerlukan pengelolaan kolaboratif yang melibatkan berbagai organisasi dan sektor secara bersama-sama. Penyelenggaraan TIFF menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan sektor swasta, komunitas, media, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kondisi yang menarik. Walaupun kolaborasi telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat dominasi pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan strategis, sementara sebagian besar stakeholder non-pemerintah lebih banyak berperan pada tahap implementasi kegiatan. Selain itu, manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh penyelenggaraan TIFF masih cenderung bersifat musiman bagi sebagian pelaku usaha dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan struktur kelembagaan dan forum koordinasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan serta pemerataan manfaat yang dihasilkan dari proses kolaborasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. Pemerintah Kota Tomohon, khususnya melalui Dinas Pariwisata Kota Tomohon, tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi, tetapi juga berperan sebagai

fasilitator, mediator, dan penghubung antar stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan TIFF. Temuan ini memperkuat teori Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan *Collaborative Governance*. Tanpa adanya kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dan mengarahkan stakeholder pada tujuan bersama, proses kolaborasi akan sulit berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa temuan penting yang diperoleh antara lain:

a. Penyelenggaraan TIFF telah dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas, media, pelaku usaha, dan masyarakat.
b. Keberadaan struktur kepanitiaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota menjadi dasar kelembagaan yang memperkuat koordinasi dan pembagian peran antar stakeholder.
c. Kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tomohon dan Dinas Pariwisata berperan penting dalam menjaga komunikasi, koordinasi, dan keberlangsungan kolaborasi.
d. Keterlibatan stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan strategis masih perlu diperkuat untuk menciptakan kolaborasi yang lebih partisipatif dan inklusif.
e. Kolaborasi yang terbangun telah menghasilkan berbagai capaian awal seperti meningkatnya kunjungan wisatawan, penguatan citra Kota Tomohon sebagai *Flower City*, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan TIFF.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) di Kota Tomohon telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, peningkatan partisipasi stakeholder non-pemerintah, pemerataan manfaat ekonomi, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antar aktor masih perlu dilakukan agar kolaborasi yang terbangun dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF), yaitu komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan, keberadaan TIFF sebagai agenda pariwisata tahunan Kota Tomohon, serta dukungan berbagai stakeholder yang terdiri atas perangkat daerah, sektor swasta, komunitas, media, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, identitas Kota Tomohon sebagai Flower City turut menjadi modal penting dalam membangun kolaborasi karena memberikan kepentingan dan tujuan bersama bagi para pihak yang terlibat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses kolaborasi. Kendala tersebut antara lain masih dominannya peran pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis, keterbatasan waktu koordinasi dan persiapan kegiatan, belum meratanya akses informasi bagi sebagian pelaku usaha, serta manfaat ekonomi yang cenderung bersifat musiman bagi sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah berjalan dengan baik, masih diperlukan upaya untuk memperkuat partisipasi stakeholder dan meningkatkan pemerataan manfaat yang dihasilkan dari penyelenggaraan TIFF.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan cukup baik. Pada dimensi *starting conditions*, kolaborasi didukung oleh adanya manfaat ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan, serta keterlibatan berbagai stakeholder yang

memiliki kepentingan terhadap keberhasilan TIFF. Pada dimensi *institutional design*, penyelenggaraan TIFF telah memiliki dasar hukum, struktur kelembagaan, serta pembagian tugas yang jelas melalui kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tomohon. Pada dimensi *facilitative leadership*, pemerintah daerah berperan aktif dalam memberikan arah kebijakan, memfasilitasi koordinasi, dan menggerakkan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan. Sementara itu, pada dimensi *collaborative process*, kolaborasi berlangsung melalui komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama antar stakeholder dalam setiap tahapan penyelenggaraan TIFF. Meskipun demikian, partisipasi stakeholder non-pemerintah dalam pengambilan keputusan serta pemerataan manfaat yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi penelitian yang hanya berfokus pada penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) di Kota Tomohon serta keterbatasan waktu penelitian dalam mengamati proses kolaborasi yang berlangsung. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji *Collaborative Governance* pada penyelenggaraan event pariwisata lainnya atau membandingkan praktik kolaborasi antar daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan event pariwisata berbasis kolaborasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tomohon, khususnya Dinas Pariwisata Kota Tomohon, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan, stakeholder terkait, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press. https://press.georgetown.edu/Book/Collaborative-Public-Management

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Aryona, B., & Leksono, A. (2024). Establishing city branding strategy for Tomohon central tourism area in Indonesia in attracting interest in visiting tourists. *Asian Journal of Environment & Ecology, 23*(3), 20–29. https://doi.org/10.9734/AJEE/2024/v23i3531

Bichler, B. F. (2019). Designing tourism governance: The role of local residents. *Journal of Destination Marketing & Management, 12*, 46–56. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.01.002

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.

Dangi, T. B., & Petrick, J. F. (2021). Enhancing the role of tourism governance to improve collaborative participation, responsiveness, representation and inclusion for sustainable community-based tourism: A case study. *International Journal of Tourism Cities, 7*(4), 1029–1048. https://doi.org/10.1108/IJTC-10-2020-0223

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Khaksar, M. R., & Amir, E. (2023). The contribution of tourism to the economic growth of a country. International Journal of Current Science Research and Review, 6(7), 4917–4921. https://doi.org/10.47191/IJCSRR/V6-i7-107

Mena, M. M., & Villamejor-Mendoza, M. F. (2024). Governance for sustainable tourism: Strong institutions as prerequisites in local tourism development. In A. Holden (Ed.), *A research agenda for the social impacts of tourism* (pp. 161–190). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789908305.00016

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Nurjaya, I. N. (2022). Global principles of sustainable tourism development ecological, economic and cultural. *Sociological Jurisprudence Journal, 5*(2), 97–106. https://doi.org/10.22225/scj.5.2.2022.97-106

Rasyid, M. R. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.

Sentanu, I. G. E. P. S., Mahadewi, N. P. E., & Sunarta, I. N. (2022). Collaborative tourism governance: A systematic literature review. *Sustainability, 14*(18), 11430. https://doi.org/10.3390/su141811430

Swandewi, N. P. D., Adinda, C. A., Adipati, I. G., & Febrianto, I. G. N. (2024). Community perspectives on the environmental, social, and economic impacts of the Tomohon International Flower Festival. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi, 5*(2), 197–206. https://doi.org/10.35912/simo.v5i2.3433

Wang, H., & Ran, B. (2022). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review, 24*(8), 1187–1210. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389

Wawo, A. K. A. S., Thaha, R., & Arifin, I. (2023). Analysis of collaborative governance in the opening of 2019 Pinisi Festival in Bulukumba Regency. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study, 4*(2), 7–10. https://doi.org/10.47616/jamrsss.v4i2.380